

SKRIPSI

**IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK DIRGA YUSA PURNAMI DEWI
NIM : 2015654008**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

**Ni Kadek Dirga Yusa Purnami Dewi
2015654008**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri
Bali)**

ABSTRAK

Pajak sebagai kontribusi terbesar APBN, menjadi tantangan kepada pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan sebagai penggerak perekonomian negara dan memiliki jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah UMKM tidak sebanding dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat merugikan negara. Untuk mengatasi hal ini, wajib pajak harus memiliki literasi pajak yang baik agar paham mengenai pentingnya pajak bagi suatu negara. Selain itu pemerintah juga melakukan reformasi sistem perpajakan dengan modernisasi sistem perpajakan yang akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi sistem wajib pajak bisa melaporkan sendiri sesuai dengan salah satu sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assesment system*. Untuk menguji wajib pajak apakah sudah melaporkan pajak sesuai keadaan yang sebenarnya pemerintah melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meminimalisir kecurangan oleh wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif asosiatif. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat uji *software IBM SPSS Statistic 25*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

**IMPLICATIONS OF TAX LITERACY, TAX SYSTEM MODERNIZATION,
AND TAX AUDITS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE**

**Ni Kadek Dirga Yusa Purnami Dewi
2015654008**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri
Bali)**

ABSTRACT

Taxes as the biggest contribution to the state budget, challenge the government to continuously increase tax revenues. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a engine of the country's economy and their number increases every year. The increasing number of MSMEs is not proportional to the tax compliance of MSMEs. The low level of tax compliance among MSMEs can harm the state. To solve this, taxpayers must have good tax literacy to understand the importance of taxes for a country. In that sense, the government is also reforming the tax system by modernizing it to facilitate taxpayers in fulfilling their tax obligations. By having modernization of the system, taxpayers can self-report according to one of the tax systems in Indonesia, the self-assessment system. To verify whether taxpayers have reported taxes in accordance with the actual situation, the government conducts tax audits. Tax audits are carried out to minimize fraud by taxpayers.

This study aims to determine the effect of tax literacy, tax system modernization, and tax audits on MSME taxpayer compliance. This research was conducted at the Gianyar Primary Tax Office (KPP Pratama Gianyar). The study analyzes primary data from questionnaires distributed to MSME taxpayers registered at KPP Pratama Gianyar. This research uses associative quantitative data analysis techniques. This test was conducted using IBM SPSS Statistic 25 software.

The results of the research show that (1) Tax literacy has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (2) Tax system modernization has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (3) Tax audits have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (4) Tax literacy, tax system modernization, and tax audits simultaneously influence MSME taxpayer compliance.

**Keywords: Tax Literacy, Tax System Modernization, Tax Audits and UMKM
Taxpayer Compliance**

**IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KADEK DIRGA YUSA PURNAMI DEWI
NIM : 2015654008**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Dirga Yusa Purnami Dewi
NIM : 2015654008
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi

Judul : Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem
Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Uttahavi, S.E.,M.Si.
Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.
Tanggal Uji : 19 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2024



Ni Kadek Dirga Yusa Purnami Dewi

SKRIPSI

**IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

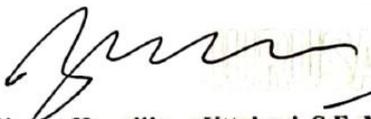
DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI KADEK DIRGA YUSA PURNAMI DEWI
NIM : 2015654008

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I,

DOSEN PEMBIMBING II,


Wawan Hesadijawa Uttahavi, S.E., M.Si.
NIP 198511052014041001


Dr. Ir. I Made Suarda, S.E., M.T.
NIP 196302251990031004

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak
NIP 197512312005011003

SKRIPSI

**IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN,
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Hari Senin Tanggal 19 Bulan Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wawan Hesadijava Uttahavi, S.E., M.Si.
NIP 198511052014041001

ANGGOTA:



2. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
NIP. 199609032022031013



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA
NIP. 197101201994122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Uttahavi, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ir. I Made Suarta, S.E.,M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini

7. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman – teman yang telah mendukung baik secara moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Diri sendiri yang telah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kelancaran skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Badung, 31 Juli 2024

Ni Kadek Dirga Yusa Purnami Dewi



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	18
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	23
D. Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel penelitian	31
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	33
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	35
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Hasil Penelitian	42
B. Uji Hipotesis.....	56
C. Pembahasan	60
D. Keterbatasan penelitian	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Implikasi	65
C. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73

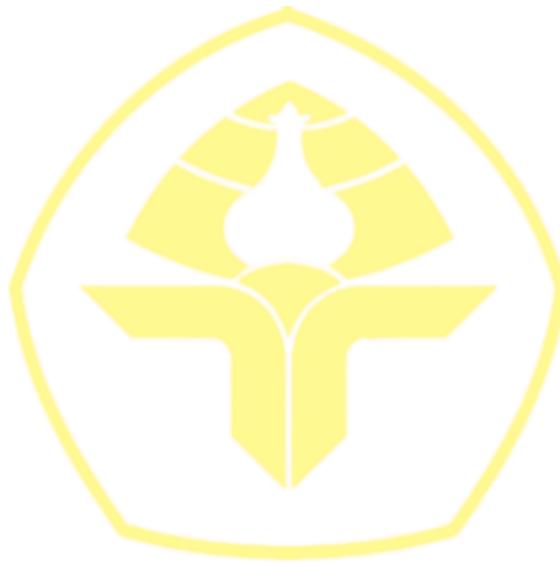
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2023	2
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar	3
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respon	36
Tabel 3.2 Interval Kategori Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha	44
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Omset	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Indikator Literasi Pajak	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Indikator Pemeriksaan Pajak	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	49
Tabel 4.11 Analisis Statistika Deskriptif Variabel Literasi Pajak	50
Tabel 4.12 Analisis Statistika Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Pajak	51
Tabel 4.13 Analisis Statistika Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak	52
Tabel 4.14 Analisis Statistika Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	53
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokidastisitas	55
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
Tabel 4.20 Hasil Uji T	58
Tabel 4.21 Hasil Uji F	59

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelian	23
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	30



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Data
- Lampiran 2: Surat Permohonan Penyebaran Kuisisioner
- Lampiran 3: Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 4: Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 5: Data Responden
- Lampiran 6: Tabulasi Data
- Lampiran 7: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 9 Uji Normalitas
- Lampiran 10: Uji Multikolinieritas
- Lampiran 11: Uji Heterokidastisitas
- Lampiran 12 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
- Lampiran 13: Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)
- Lampiran 14: Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara dari pajak telah menjadi elemen yang utama dalam menggerakkan roda perekonomian (Listiyowati et al., 2021). Sebagai kontribusi terbesar dari APBN, menjadi tantangan kepada pemerintah guna terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Pengoptimalan penerimaan pajak perlu didukung dari upaya – upaya nyata seperti kerja sama pemerintah dengan masyarakat atau wajib pajak (Utthavi dan Ayuni, 2019). Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sumbangan terbesar di Produk Domestik Bruto salah satunya yaitu dari Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 60,5%. Maka dengan hal ini perekonomian di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM. UMKM berperan sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia (Meliandari dan Utomo, 2022). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan UMKM di Indonesia berjumlah 8,71 juta pada tahun 2022 dan menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 7.608.201 orang. Hal ini sangat berdampak positif dalam sektor ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di sektor UMKM dapat dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Komoditas yang dapat diperdagangkan yaitu seperti makanan, minuman, kerajinan dan lainnya (Indrawan dan Binekas, 2017).

Jumlah UMKM di Indonesia yang sangat banyak menjadi perhatian DJP. DJP berusaha agar UMKM dapat menyumbangkan kontribusi yang

signifikan bagi penerimaan negara. Diharapkan penerimaan pajak yang tinggi tidak hanya terjadi di nasional, namun juga di tingkat kabupaten (Utama dan Setiawan, 2019). Khususnya Provinsi Bali yang memiliki 9 kabupaten dengan jumlah UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia dengan jumlah UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Klasifikasi			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Badung	16.757	4.124	818	21.669
2	Bangli	40.615	2.757	879	44.251
3	Buleleng	59.731	5.309	1.327	66.367
4	Denpasar	27.096	1.802	851	29.749
5	Gianyar	50.027	22.623	3.016	75.666
6	Jembrana	67.110	73	-	67.183
7	Karangasem	50.647	45	25	50.717
8	Klungkung	35.672	104	16	35.792
9	Tabanan	47.957	-	-	47.957
Jumlah		395.612	36.837	6.932	439.381

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, 2023

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tahun 2023 terdapat 439.381 UMKM di Bali. Data tersebut didominasi dari Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 75.666 UMKM. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Gianyar yang berkontribusi terhadap perekonomian harus sejalan dengan kepatuhan perpajakannya agar penerimaan pajak berjalan optimal.

Tabel 1. 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar

Tahun	UMKM Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan Terlapor	Rasio Kepatuhan (%)	Realisasi Penerimaan
2019	22.878	12.284	54%	77.129.772.046
2020	25.347	10.937	43%	53.853.187.161
2021	25.966	12.130	47%	63.164.695.339
2022	26.462	14.555	55%	135.096.789.116
2023	26.826	13.255	49%	96.453.540.155

Sumber: KPP Pratama Gianyar, tahun 2023

Pada table 1.2 dipaparkan tahun 2023 tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Gianyar mengalami penurunan yaitu 49%. Hal ini merupakan kabar buruk bagi DJP, menurunnya kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masyarakat kurang mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Seiring perkembangan zaman masyarakat bisa memperoleh informasi dari mana saja termasuk mengenai memperoleh informasi ataupun pengetahuan mengenai perpajakan. Sebagai seorang wajib pajak untuk memiliki pengetahuan pajak sudah sepatutnya kita memiliki literasi mengenai perpajakan. Literasi pajak diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam memahami informasi terkait perpajakan (Kusumadewi dan Dyarini, 2022). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik, menyadari bahwa pajak yang telah mereka bayarkan akan membantu dan digunakan untuk pembangunan negara (Kusumadewi dan Dyarini, 2022). Semakin tinggi kualitas literasi yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin besar

kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan pemahamannya. Literasi perpajakan yang dimiliki akan berdampak positif dalam kesadarannya membayar pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan perpajakannya. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan pajak dia tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, maka literasi terkait perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak. Penelitian dari (Yuliatric dan Fauzi, 2020) menunjukkan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dikarenakan seorang wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang tinggi dan rendah tidak menjamin berperilaku patuh jika tidak dibarengi dengan kesadaran untuk patuh terhadap pajak dan didukung penelitian oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Dyarini (2022), tinggi atau rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak jika tidak diimplementasikan maka hal itu tidak berarti menjadikan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya, namun tidak sejalan dengan penelitian dari Putri et al. (2023) bahwa pengaruh literasi pajak memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi literasi perpajakan, semakin baik juga kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah sebagai penyusun kebijakan berupaya dalam meningkatkan kontribusi dari sektor pajak salah satunya yaitu perubahan sistem perpajakan. Pemerintah mulai menerapkan berbagai reformasi perpajakan seperti perubahan tarif PPh final Menurut Nadhor et al. (2020) selain menurunkan tarif PPh final pemerintah juga memanfaatkan sistem teknologi untuk menyediakan layanan

kepada wajib pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi pajak secara manual masih memiliki kelemahan (Darmayasa et al., 2020). DJP telah melakukan kemudahan dalam hal administrasi perpajakan, dengan berbagai peraturan terkait digitalisasi administrasi perpajakan telah diterbitkan DJP (Wirayana et al., 2023). Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mempermudah wajib pajak guna melakukan administrasi perpajakannya (Putra, 2020). Pemanfaatan teknologi dalam hal modernisasi sistem pajak guna efisiensi pemungutan pajak dan pengoptimalan penerimaan pajak (Musseng et al., 2023). Modernisasi sistem juga akan menanamkan nilai nilai inti DJP, hal ini akan meningkatkan kemampuan DJP dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan secara efektif (Musseng et al., 2023).

Menurut kajian oleh Handayani et al. (2020) modernisasi sistem berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena membantu wajib pajak dalam memudahkan administrasi perpajakannya temuan tersebut selaras dengan penelitian (Putra, 2020) modernisasi perpajakan menghadirkan dampak positif karena wajib pajak mengungkapkan bila sistem administrasi pajak haruslah mudah dimengerti serta dijalankan, dengan adanya kemudahan akan mengalami peningkatan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, berdasarkan pandangan Suprianto et al. (2023) modernisasi sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan kepada wajib pajak karena pemahaman dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah, hal ini mengakibatkan ketidakpedulian wajib pajak terhadap perubahan administrasi perpajakan.

Kemudahan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya

dapat diterapkan dengan menerapkan salah satu sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Jenis sistem ini diterapkan untuk menyerahkan kepercayaan kepada wajib pajak guna melakukan pelaporan pajak secara mandiri dapat memicu peningkatan ketidakpatuhan berupa kecurangan dalam pelaporan pajak. (Utama dan Setiawan, 2019). Wajib pajak mendapat kepercayaan untuk untuk perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya secara mandiri namun tetap wajib dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan perpajakannya (Lesmana dan Setyadi, 2020). Pemantauan yang dilakukan oleh DJP dilihat dari setiap masa pemberitahuan SPT dan SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Haidarputra et al., 2022). Mengacu pada Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 29 DJP dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Adanya pemeriksaan pajak yang dijalankan guna menurunkan tingkat penghindaran dan penggelapan pajak (Prasetyo dan Hidayatulloh, 2022). Jika wajib pajak mengabaikan kewajiban yang dijalankan maka dapat dikenakan berupa sanksi pajak. Penelitian Lesmana dan Setyadi (2020) pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan undang - undang dan sudah cukup tegas, kemungkinan para umkm tidak takut diperiksa karena mereka merasa bahwa omset mereka yang relatif kecil sehingga terkadang tidak menjadi sorotan. Adapun penelitian dari Darmayasa et al, (2022) menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan

pajak wajib pajak takut terhadap pemeriksaan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sata et al. (2022) pada penelitiannya turut mengungkapkan pemeriksaan pajak memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara tentunya akan terus berupaya dalam melakukan optimalisasi perpajakan (Kusumadewi dan Dyarini, 2022). UMKM sebagai salah satu pendorong ekonomi di Indonesia yang berkembang sangat pesat agar selalu sejalan dengan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penerimaan perpajakan yang optimal maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dan ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, penulis tertarik kembali untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mempertanyakan mengenai implikasi literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah serta ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya pada latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah literasi pajak memiliki implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan memiliki implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemeriksaan pajak memiliki implikasi terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM?

4. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Batasan Masalah

Batasan - batasan masalah yang digunakan agar lebih terarah maka peneliti memberikan batasan penelitian yaitu literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar, kategori UMKM yang dipilih yaitu UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar Kabupaten Gianyar. Dalam penggunaan teknologi sistem perpajakan peneliti memfokuskan pada layanan seperti *e-billing*, *e-form*, *e-filling*, dan *e-registration*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan meningkatnya jumlah UMKM, peneliti ingin mengetahui faktor - faktor apa saja yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jadi tujuan penelitian lebih spesifik yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implikasi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui implikasi modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui implikasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk mengetahui implikasi literasi pajak, modernisasi sistem dan

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan literasi perpajakan, modernisasi sistem pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi UMKM

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berjalan seiring dengan reformasi perpajakan. Sistem perpajakan mulai berkembang seiring berjalannya waktu, dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Maka penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai pentingnya literasi tentang perpajakan, mengetahui berbagai e-system terkait perpajakan, dan tentang pemeriksaan pajak. Nantinya dengan adanya perkembangan teknologi maka penggunaan *e-system* akan berjalan optimal.

2) Bagi Otoritas Pajak

DJP selaku otoritas pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak bisa dicapai apabila terdapat kepatuhan dari Wajib Pajak. Dengan penelitian ini diharapkan faktor faktor seperti literasi pajak, modernisasi sistem, dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan

kepatuhan pajak UMKM. Selanjutnya bisa menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kinerja dan membuat kebijakan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya dalam ilmu perpajakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi diaplikasikan sebagai rujukan kedepannya untuk mengembangkan penelitian mengenai perpajakan. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu kepatuhan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai implikasi literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bila literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada KPP Pratama Gianyar. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman terkait perpajakan, sehingga pemahaman yang dimiliki akan menghadirkan dampak positif dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini menyatakan bila modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar. Kondisi demikian menandakan bila semakin mudah dan manfaat yang diberikan system yang modern maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
3. Hasil penelitian ini menyatakan bila pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak yang dijalankan dapat menghadirkan efek jera terhadap wajib pajak, sehingga dengan hal ini wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

4. Hasil penelitian ini menyatakan bila literasi pajak, modernisasi system pajak, dan pemeriksaan pajak menghadirkan pengaruh secara simultan pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan secara bersama – sama jika variabel literasi pajak, modernisasi sistem pajak, dan pemeriksaan pajak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

B. Implikasi

1. Implikasi praktis UMKM

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi wajib pajak UMKM guna memahami terkait perpajakan serta kepatuhan wajib pajak. Melalui modernisasi system perpajakan akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan administrasi perpajakan. Wajib pajak UMKM diharapkan dapat memanfaatkan system yang ada sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak UMKM yang belum mengetahui mengenai pemeriksaan pajak, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi terkait dengan pemeriksaan.

2. Implikasi praktis otoritas pajak

Penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi kinerja dari otoritas pajak atas kebijakan – kebijakan yang telah dilakukan. Penelitian ini juga dapat melihat seberapa besar pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan. Otoritas pajak bisa merujuk pada penelitian ini dalam pengambilan keputusan, yang kedepannya akan menghadirkan respon yang positif pada wajib pajak.

C. Saran

Terciptanya kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari kerja sama antara wajib pajak dengan DJP. Kerja sama yang baik akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang optimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan terdapat kekurangan pada penelitian ini, maka diajukan beberapa saran yaitu:

1. Bagi UMKM

Bagi wajib pajak UMKM di Bali khususnya Kabupaten Gianyar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakannya. Wajib pajak yang belum memanfaatkan system yang modern direkomendasikan untuk memanfaatkan system yang ada. Penggunaan sistem administrasi yang modern akan memudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Serta akan lebih teliti dalam melaporkan pajaknya agar terhindar dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Bagi Otoritas Pajak

KPP Pratama Gianyar diharapkan dapat memberikan edukasi terkait dengan sistem perpajakan modern untuk pelaporan pajaknya serta memberikan edukasi terkait pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu negara. Otoritas pajak harus tegas dalam menindaklanjuti jika ada kecurangan dalam administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memuat berbagai kekurangan, untuk itu pada

penelitian mendatang diperlukan pengembangan yang lebih lanjut, seperti penambahan variabel lain, penambahan sampel serta memperluas objek penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. I. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 899–911.
- Amanda, O., Ananda Viarna, F., Indah, K. S., Saputra, M. R. A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1). www.riau.gp.id
- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 221–250. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Arta, M. V., & Khoiriawati, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02).
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2).
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 2579–9975. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Fransisca, V. (2022). The Effect of Modern Tax Administration System and Quality of Tax Service on Motivation to Pay Taxes at the Medan Polonia Pratama Tax

- Service Office. *Eka Prasetya Journal of Accounting Studies*, 8(1), 113–124. <http://www.jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/>
- Haidarputra, A., Pahala, I., & Muliastari, I. (2022). The Effect Of The Number Of Taxable Enterprise, Tax Audit, Tax Collection On Value Added Tax Receiving. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 63–77. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japaDOI:http://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditing/XX.X.XX>
- Handayani, F., Bachtiar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>
- Hts, D. I. G., Asbari, H., Ramadhani, J., Makito, S., & Lubis, I. S. (2023). Analisa Keamanan Informasi Pengguna Inlander Dengan Metode Analisis Dan Metode Kuantitatif. *UNES Journal of Information System*, 8(1). <https://fe.ekasakti.org/index.php/UJIS>
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2017). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Kuhuparuw, V. J., Ardiansyah, & Nunumete, L. S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with OP Annual SPT Submission. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 5(4). <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7211>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01).
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. www.pajak.go.id
- Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1).
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S).
- Musseng, A., Hasanuddin, R., & Umar, R. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance of Free Workers at the Makassar Tax Office. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2).
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. (2020). Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 11(1).
- Noreen, C. A., & Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 35–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Prasetyo, A., & Hidayatulloh, A. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bantul: Apakah Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Berperan? *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 154–163. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.154-163>
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1703–1709. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1).
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawati, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2).
- Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan). Retrieved March 25, 2024, from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Rauf Abdul, Mahmud, A., & Yuliana. (2023). Pengaruh Himbuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(2), 74–79.

- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK*, 14(1), 58–81.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK*, 12(1), 20–37.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Saharani1, S. A., & Sari2, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Sata, M. B., Samrotun, Y. C., & Siddi, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 28–40. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03>
- Semiring, S., Sinaga, R. V., & Ginting, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *JRAK*, 7(1).
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2018). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1). <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2). <http://journal.um.ac.id/index.php/jabe/>
- Suprianto, D., Oktavia, N. D., & Dharma, T. Y. (2023). Pengaruh Tax Morale (Pemahaman Aturan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pontianak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2).
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2).
- Utama, P. N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>

- Utthavi, W. H., & Ayuni, N. W. D. (2019). Pengaruh Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i1.1109>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Jurnal Politeknik Caltex Riau Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Widati, S., Maulana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2).
- Wirayana, I. M. A., Utthavi, W. H., & Sumiari, K. N. (2023). E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA. *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*, 12(09), 1858–1865.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i09.p17>
- Wulandari, I., Sinaga, Y. V. Y., & Utomo, R. B. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3).
<https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta). *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 4(1), 69–78.